

KETERLIBATAN DIGITAL PRESIDEN JOKO WIDODO MELALUI TWITTER PADA SEPUTAR PELANTIKANNYA SEBAGAI PRESIDEN INDONESIA 2019-2024

Arif Susanto

arif.s@lspr.edu

Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR Jakarta

Abstract

This study try to figure out digital engagement of President Joko Widodo through his Twitter account @jokowi. Digital engagement shows not only willingness to get involve in a political conversation by means of social media, but also a part performed in a digital interaction by which elite affecting perception and participation of political mass. It was found that in his digital engagement, President Jokowi need to be more interactive by urging his tweet to be more assertive, as an addition to his narrative and descriptive style of communication. This would indicate that the president is communicatively and politically capable of being a Twitter in Chief.

Keywords: Keterlibatan digital, Twitter @jokowi, komunikasi dialogis

PENDAHULUAN

Selain demokrasi, teknologi memberi kontribusi penting bagi perkembangan komunikasi politik mutakhir. Teknologi informasi komunikasi yang semakin interaktif idealnya memungkinkan lahirnya berbagai bentuk diskursus politik, terutama di antara tiga pelaku penting: elite, media, dan massa. Lewat media sosial, antara lain Twitter, interaksi menjadi semakin intensif, ekspresif, dan nyaris tanpa jarak yang membedakan para pelaku dalam sekat-sekat sosial. Twitter juga berpeluang menjadi medium untuk menggalang opini, mengontrol kekuasaan, atau mengembangkan bentuk-bentuk diskursus publik. Kehadiran Twitter dalam suatu masyarakat berjejaring telah menggontarkan pemerintahan-pemerintahan otoriter; sementara di negara-negara relatif bebas, Twitter menjadi bagian penting kampanye politik atau pun komunikasi politik keseharian.

Presiden Joko Widodo akrab disebut Jokowi termasuk *elite* politik yang kerap memanfaatkan Twitter sebagai media komunikasi. Sebelumnya dikenal

dengan akun @jokowi_do2, pada 2015 Presiden Jokowi memperkenalkan akun @jokowi, yang telah mendapatkan verifikasi dari Twitter. Dengan pengikut lebih daripada dua belas juta pada akhir 2019 (jumlah pengikut dapat mengalami fluktuasi), akun @jokowi menandai keterlibatan digital sang presiden dalam suatu bentuk baru komunikasi politik era internet. Dengan format mikroblog, peluang diskursus pada aplikasi Twitter lebih terbuka. Selain lebih ringkas dengan 280 karakter, keterhubungan dialogis merupakan alasan kuat banyak orang untuk menggunakan media sosial Twitter.

Dalam kerangka diskursus, pertanyaan tentang interaktifitas Twitter muncul karena sebagai suatu aplikasi percakapan, Twitter kadang menjadi medium perseteruan. Respons kebijakan terhadap hal ini telah dilakukan, seperti laporan atas perilaku yang bersifat menghina. Tanpa hendak mengabaikan negativitas semacam itu, kajian ini lebih ingin melihat suatu kemungkinan bahwa Twitter dapat membantu keterlibatan

komunikasi. Dalam suatu demokrasi deliberatif, aspek diskursus publik memberi suntukan spirit permusyawaratan rakyat, yang kerap dipandang sebagai esensi demokrasi. Dengan segala potensialitasnya, media sosial seperti Twitter tetap tidak menjamin bahwa penerapan teknologi komunikasi digital pasti berbuah demokrasi partisipatoris.

Tegangan antara idealitas dan realitas, seperti tergambar dalam paragraf-paragraf terdahulu, menjadi suatu pemicu untuk menyelidiki keterlibatan digital Presiden Jokowi. Sebagaimana diketahui, Jokowi terpilih kembali sebagai Presiden Indonesia hasil Pemilu 2019, dan telah dilantik pada 20 Oktober 2019 untuk periode kedua selama lima tahun berikutnya. Masa 30 hari terakhir merupakan masa krusial bagi penyelesaian periode kepresidenan terdahulu, sedangkan 30 hari pertama turut menentukan wajah awal periode baru kepresidenan. Amatan terhadap 60 hari tersebut menarik karena masa-masa akhir dan awal ini kerap diisi berbagai pergulatan politik yang mungkin berdampak pada kinerja dan kepemimpinan presiden.

Berfokus pada teknik pemasaran, Alimuddin dan Seniwati (2016) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Youtube memberi kontribusi terhadap kemenangan Jokowi pada Pemilu 2014. Mencermati kicauan akun Twitter pendukung kandidat capres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, Firmansyah, Karlinah, dan Sumartias (2017) menemukan bahwa permainan kata-kata melalui Twitter turut membangun suatu konstruksi figuratif terhadap sosok kandidat pada Pemilu 2014. Sedangkan Purwanto (2017) berusaha untuk menemukan penjelasan tentang gaya komunikasi dan seni diplomasi Presiden Jokowi di era media sosial.

Berbeda dengan ketiga studi di atas, studi ini dimaksudkan untuk mencermati keterlibatan digital Presiden Jokowi. Keterlibatan digital dalam hal ini dipahami bukan semata mencakup kesediaan seseorang untuk terlibat dalam suatu percakapan politik secara digital melalui media sosial. Lebih daripada itu, keterlibatan digital patut dimaknai pula sebagai suatu peran serta dalam suatu interaksi digital, yang dapat mempengaruhi persepsi dan partisipasi lanjut warga negara dalam politik. Demi berfokus pada keperansertaan, penelitian ini memilih pertanyaan pokok: bagaimana keterlibatan komunikasi digital Joko Widodo melalui akun @jokowi selama 30 hari sebelum dan setelah pelantikannya sebagai Presiden Indonesia 2019-2024?

Penelitian ini memiliki tujuan pokok untuk bukan hanya mendeskripsikan komunikasi politik Joko Widodo melalui Twitter pada 30 hari sebelum dan setelah pelantikannya sebagai Presiden Indonesia 2019-2024. Lebih lanjut, tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan mendedah gejala keterlibatan digital dalam komunikasi melalui media sosial tersebut. Pada akhirnya, penelitian diharapkan dapat berkontribusi bagi kajian tentang keterlibatan digital dan diskursus publik. Secara lebih praktis, hasil kajian ini dimaksudkan pula untuk bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan keterlibatan digital dalam suatu komunikasi politik.

KAJIAN LITERATUR

Keterlibatan Komunikasi

Konsep ‘peran serta’ mulanya muncul sebagai suatu konstruksi psikologi terkait keterlibatan para pekerja dalam lingkup pekerjaan mereka. Pada tataran kognitif, konsep ini mula-mula menekankan ‘keterlibatan sebagai suatu keadaan’ yang merupakan hasil meka-

nisme stimulus-respons terkait keterlibatan konsumen, peserta didik, atau pun pekerja. Belakangan, pendekatan interpretif dan konstruktivis memperkaya tinjauan dengan berfokus pada proses penciptaan dan penciptaan-ulang makna melalui komunikasi serta menggeser atribusi, dari sekadar proses pada tataran individual menjadi meliputi proses pada tataran sosial yang lebih luas. Pada tataran sosial, keterlibatan tersebut mewujudkan dalam suatu proses sosial dinamis yang berdampak terhadap organisasi maupun para pemangku kepentingan (periksa Johnston dalam Johnston dan Taylor, eds, 2018).

Keterlibatan komunikasi menempatkan individu dalam suatu relasi berhadap-hadapan, yang ditandai oleh keberagaman interaksional dan pemaknaan bersama. Pada tataran sosial, keterlibatan komunikasi mewujudkan dalam ekspresi *behavioral*, kognitif, dan afektif demi pencapaian tujuan kelompok. Sebagai suatu proses, keterlibatan komunikasi pada tataran individu menggambarkan perkembangan terdampak tindakan komunikasi atau intervensi demi mewujudkan keterlibatan komunikasi tersebut. Pada tataran sosial, sebaliknya, proses keterlibatan komunikasi mewujudkan dalam suatu program terstruktur untuk mendorong agar opini maupun diskursus kelompok dapat diakomodasi dalam pengambilan putusan.

Johnston menggambarkan keterlibatan komunikasi sebagai suatu keadaan maupun sebagai suatu proses pada tataran individu maupun pada tataran sosial melalui suatu taksonomi, sebagai berikut.

	Keadaan	Proses
Individual	Kognitif, afektif, atau <i>behavioral</i> , dimensi keterlibatan ditetapkan berdasarkan suatu kontinum.	Perkembangan yang muncul sebagai hasil intervensi komunikasi untuk menumbuhkan keterlibatan
Sosial	Suatu keterlibatan kolektif yang ditandai oleh ekspresi <i>behavioral</i> [tindakan kolektif, partisipasi kelompok], ekspresi kognitif dan afektif [orientasi, maksud, pengalaman] yang diarahkan untuk pencapaian tujuan kelompok.	Suatu program terstruktur, berkenaan diskursus dan tindakan, untuk mewujudkan representasi sosial di antara opini dan perspektif berlainan dalam pengambilan putusan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial dan menciptakan modal sosial.

Gambar 1 Level analisis dalam keterlibatan komunikasi

Lebih lanjut Johnston mengajukan keterlibatan komunikasi sebagai suatu strategi. Sebagai suatu strategi, keterlibatan sosial menggambarkan upaya organisasi untuk melibatkan warga pada tataran sosial sebagai pelaku yang memberi sumbangan bersama pada pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan *civil society*. Keterlibatan itu mencerminkan filosofi organisasi yang kondusif dalam memadukan antara makna dan nilai yang tumbuh dari berbagai pandangan para pemangku kepentingan. Pada akhirnya, terdapat orientasi untuk mengarahkan keterlibatan itu selaras dengan arah, tujuan, sumber daya, dan sejumlah pertimbangan terkait apa yang ingin diraih oleh organisasi.

Taylor dan Kent (2014) memaknai keterlibatan komunikasi dalam kerangka dialog. Menurut mereka, melalui keterlibatan tersebut organisasi beserta publik dapat membuat putusan bersama-sama yang berdampak penciptaan modal sosial. Keterlibatan komunikasi merupakan orientasi yang memengaruhi interaksi dan pendekatan yang memandu proses interaksi dalam suatu kelompok (Awaludin, 2020). Dalam suatu relasi yang akrab, lanjut Taylor dan Kent, publik diajak untuk membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan dan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Dengan keterlibatan tersebut, publik bersedia untuk menyampaikan pandangan

mereka berhadapan dengan pihak lain. Hal ini mengandaikan aksesibilitas, kehadiran, dan kehendak untuk berinteraksi.

Muatan etis dalam komunikasi dialogis, demikian Taylor dan Kent mengidentifikasi, terletak pada kemampuannya untuk memitigasi relasi kuasa, menghargai martabat individu, serta upayanya untuk melibatkan partisipan dalam suatu percakapan dan pengambilan putusan. Lebih lanjut, Lane dan Kent (dalam Johnston dan Taylor, eds, 2018) mengidentifikasi komunikasi dialogis meliputi hal-hal berikut:

- Risiko, atau kehendak untuk berbagi dan berubah.
- Kepercayaan, atau kehendak untuk saling berbagi informasi penting dan tidak menahan persebaran informasi demi keuntungan pribadi.
- Saling menghargai dan berbagi peran.
- Mendiskusikan secara etis berbagai topik yang berjangkauan luas dan inklusif.
- Mengekspresikan gagasan secara retorik, sensitif terhadap kepentingan dan keyakinan orang lain, serta menjalin interaksi dengan menimbang pilihan, kekurangan, dan kebutuhan para partisipan.

Dalam komunikasi dialogis, para peserta mengembangkan strategi dan taktik komunikasi bukan hanya untuk menjangkau dan melingkupi orang lain, tetapi juga untuk menimbang kepentingan mereka. Hal ini dibutuhkan demi dapat menangkap respons para peserta komunikasi, yang merupakan suatu konsep mendasar dalam operasionalisasi keterlibatan dialogis. Berikutnya, Lane dan Kent mendedah orientasi dialogis tersebut diekspresikan dalam kesediaan orang untuk:

- Berkomunikasi dengan orang lain tentang topik atau isu tertentu menyangkut kepentingan bersama.
- Bertindak untuk mendorong partisipasi orang lain [atau sedikitnya tidak menghalangi partisipasi].
- Menghargai hak orang lain untuk berkontribusi, meskipun posisi seseorang itu berseberangan dengan posisi orang lain.
- Berkomitmen dengan gagasan bahwa keterlibatan dalam dialog dapat mengubah posisi seseorang.
- Menjangkau peserta yang mungkin memiliki sumbangan gagasan, kendati mereka berjarak, atau memiliki gagasan yang berseberangan.
- Menyediakan diri untuk mendengarkan, merenungkan, dan merespons.
- Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan bagi berlangsungnya proses dialog.

Mutualitas merupakan suatu kondisi yang dipersyaratkan oleh tindakan komunikasi dialogis. Di dalamnya orang dituntut untuk bukan semata ingin didengar, tetapi juga bersedia untuk mendengar. Makna dalam komunikasi tersebut, selanjutnya, muncul sebagai hasil percakapan; bukan hasil pemaksaan oleh satu pihak yang lebih dominan terhadap pihak lain. Langkah ini secara tegas mendorong terbentuknya suatu jaringan komunikasi di antara beragam pelaku.

Twitter

Dalam *Twitter for Dummies*, Fitton et al (2014, h. 9-10) mengilustrasikan Twitter sebagai suatu jaringan social-suatu abstraksi sosial yang menggambarkan siapa yang Anda ketahui dan siapa yang menjadi objek ketertarikan Anda (terlepas Anda mengenalnya atau tidak) – yang dapat Anda akses melalui komputer atau melalui perangkat bergerak komunikasi lain yang terhubung internet.

Seperti halnya media sosial lainnya, Twitter menyediakan suatu jaringan komunikasi elektronik, yang dengan itu para pengguna dapat membangun suatu komunitas daring melalui informasi, gagasan, pesan pribadi, dan konten-konten lain (berupa teks, gambar, maupun video) yang dibagikan kepada publik.

Dibangun pertama kali pada 2006 oleh empat *entrepreneur* bidang teknologi – Evan Williams, Biz Stone, Noah Glass, dan Jack Dorsey– Twitter telah menjangkau dunia melalui jaringan yang mulanya dikembangkan dari San Francisco. Twitter berkembang menjadi salah satu media sosial terkemuka, yang sejauh ini berhasil menarik lebih 336 juta pengguna aktif bulanan di seluruh dunia, dan diproyeksikan akan terus tumbuh (<https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users/>). Di tengah paradoks dunia modern dengan gejala surplus informasi dan defisit perhatian, Twitter menarik para penggunanya dengan karakter mikroblog, yang membatasi pesan maksimum 280 karakter (sebelumnya 140 karakter). Tidak sekadar memungkinkan para pengguna terhubung, pembatasan ini cenderung mendorong fokus dan efisiensi komunikasi di antara mereka.

Fitton et al (2014, h. 12) juga mengidentifikasi empat alasan mengapa orang menggunakan Twitter. Pertama, agar terhubung; menjadi bagian dari suatu komunitas dan diperhatikan dunia merupakan alasan penting orang terkoneksi dengan Twitter. Kedua, membuat catatan; publikasi kenangan atau peristiwa-peristiwa berkesan lain dapat dilakukan melalui Twitter. Ketiga, untuk berbagi; selain publikasi, berbagi telah menjadi salah satu fitur yang paling sering digunakan di media sosial, men-

itas. Keempat, menjaga relasi; banyak orang menggunakan Twitter agar dapat terus terhubung dengan kawan, keluarga, dan orang-orang penting dalam kehidupan mereka. Tidak terbatas pada kepentingan-kepentingan personal, Twitter bahkan telah pula dimanfaatkan oleh korporasi maupun politikus untuk membangun jaringan dan menarik perhatian maupun dukungan khalayak. Twitter telah menjangkau kalangan yang berlainan.

Sementara, Schmidt (dalam Weller et al, eds, 2013, h. 4) menunjuk Twitter sebagai suatu ruang komunikatif yang memungkinkan kemunculan satu bentuk baru kepublikan, yaitu publik personal. Sebagai penanda penting jejaring sosial, publik personal juga lekat dengan Twitter. Berbeda dibandingkan publik tradisional dalam media massa jurnalistik, Schmidt lebih lanjut menjelaskan bahwa informasi dalam publik personal memiliki tiga elemen. Pertama, suatu bentuk baru kepublikan berisi informasi yang diseleksi dan disajikan seturut relevansi personal. Kedua, informasi dibagikan kepada audiens tertentu (yang dipilih) sehingga membentuk ikatan jaringan. Ketiga, informasi disampaikan dalam suatu moda percakapan.

Bruns dan Moe (dalam Weller et al, eds, 2013, h. 15-28) membagi lapis-lapis komunikasi dalam Twitter menjadi tiga tataran: mikro, meso, dan makro. Pada tataran mikro, seorang pemilik akun dapat mengirimkan suatu cuitan untuk ditujukan secara spesifik kepada pengguna tertentu, termasuk pengikut (*follower*) tertentu. Aplikasi Twitter menyediakan fasilitas *@mention* maupun *@reply* untuk merujuk pengguna tertentu sebagai pihak yang disasar melalui suatu pesan. Pada tataran meso, arus informasi dipengaruhi oleh kapasitas para pengguna untuk saling mengikuti (*follow*). Dengan

itu, suatu cuitan yang dikirimkan seseorang melalui akunnya menyebar di antara para pengikutnya, dan dapat disebarkan lebih lanjut (*retweet*). Pada tataran makro, pemilik akun menggunakan sintaks tertentu, misalnya tanda pagar # diikuti kata kunci untuk menunjukkan relevansi cuitannya dengan suatu topik. Hal ini juga membuat suatu cuitan berpeluang menjangkau pengguna dalam skala lebih luas.

Meskipun demikian, masing-masing lapis komunikasi tidak harus berdiri terpisah satu sama lain; interkoneksi antar lapis dimungkinkan oleh platform Twitter. Cuitan terkait #topik tertentu dapat secara bersamaan ditujukan kepada @akun tertentu, bahkan tanpa dua akun atau lebih saling mengikuti. Hal ini membuat pengguna dapat pula berpindah dari lapis meso menuju lapis mikro yang lebih akrab atau lapis makro yang berjangkauan lebih luas. Situasi semacam ini kerap kita dapati saat publik membicarakan suatu topik aktual yang mendapat perhatian luas, seperti Piala Dunia atau Pemilihan Umum. Kelenturan Twitter sebagai suatu platform komunikasi publik ini berkontribusi terhadap keberhasilannya menjadi suatu layanan media sosial yang digunakan secara luas.

Mencermati gejala serupa, Murthy (2013, h. 5) menyatakan bahwa batas antara publik dan privat menjadi amat kabur manakala orang mendapati percakapan yang sangat spesifik di antara individu-individu yang dimaksudkan sebagai suatu relasi privat, tetapi di-cuitkan sehingga dapat diakses oleh publik. Media sosial, demikian sebut Murthy, pada dasarnya merupakan suatu media yang berorientasi publikasi; namun, sisi "sosial" pada media sosial itulah yang membedakannya disbandingkan media massa yang lebih tradisional. Catatan lebih spesifik tentang hal ini

dapat diringkas sebagai berikut. Twitter dapat dibedakan dari Facebook, suatu jaringan sosial yang berpusat pada pertemanan di antara penggunanya. Sekaligus Twitter dapat dibedakan dari blog, suatu platform publikasi di mana seorang penulis dapat menyampaikan gagasan atau pandangan tertentu secara ekstensif. Twitter, dengan demikian, dapat dipahami sebagai suatu *microblog* dengan pesan-pesan pendek dalam suatu komunikasi multi-lapis yang memungkinkan terjadinya suatu percakapan.

Dengan berbagai karakter tersebut, Twitter dapat menjadi medium untuk presentasi diri. Mulai dari seorang individu mengabarkan aktivitasnya hingga suatu korporasi menampilkan produknya. Sebagai medium percakapan, Twitter juga dapat menjadi arena diskursus. Bukan hanya menginformasikan sesuatu, melalui platform ini orang dapat mendiskusikan berbagai topik secara terbuka dan interaktif. Selain itu, dengan keterlibatan meluas para penggunanya, Twitter dapat menjadi suatu medium bagi lahirnya kekuatan sosial yang mampu membentuk ulang konstruksi sosial, entah ke arah yang lebih baik atau pun ke arah yang lebih buruk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum berusaha untuk memahami fenomena dalam konteks naturalnya, tanpa peneliti berusaha untuk melakukan manipulasi terhadap objek amatan. Data-data dalam penelitian ini terutama dalam bentuk kata-kata dan ekspresi bahasa hasil amatan terhadap fenomena yang diselidiki.

Rakhmat (2009, h. 25) menyebut bahwa penelitian deskriptif ditujukan untuk: 1] mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan

gejala yang ada, 2] mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, 3] membuat perbandingan atau evaluasi, 4] menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Teorisasi dalam penelitian ini menggunakan model deduktif, dengan teori tertentu menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, juga dalam melakukan pengumpulan data dan kemudian analisis data (periksa Bungin, 2011, h. 24). Pengumpulan data pertamanya dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran dokumen serta data-data tertulis, terutama terkait cuitan @jokowi dalam rentang waktu 30 hari sebelum dan sesudah pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia 2019-2024. selain itu, dilakukan pula suatu *focus group discussion*, antara lain untuk mendapatkan persepsi, pemaknaan, dan respons dari para narasumber ahli tentang objek penelitian. Hal terakhir juga dimaksudkan sebagai suatu pertimbangan dan pengecekan ulang informasi, di samping dapat menghadirkan perspektif yang beragam.

Nara sumber ahli yang dipilih dalam *focus group discussion* ini ada tiga orang. Pertama, Adinda T Muchtar, Direktur Eksekutif *The Indonesian Institute* sekaligus juga analis politik dan kebijakan publik. Kedua, Ignatius Haryanto, pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara dan peneliti pada Lembaga Studi Pers dan Pembangunan. Ketiga, Robertus Wardhy, jurnalis desk politik pada *Harian Suara Pembaruan*. Diskusi bersama para narasumber ahli dilakukan berseri pada 21 Mei 2020 dan 28 Mei 2020.

Terhadap data-data yang diperoleh dilakukan uji keabsahan melalui triangulasi sumber data, dengan cara membandingkan keadaan dan perspektif para nara sumber ahli, dokumen berlainan tentang objek yang sama, serta membandingkan hasil diskusi dengan dokumen tertentu. Setelah dilakukan reduksi, data-data dianalisis dan dimaknai, termasuk dengan merujuk konsepsi teoretik sebagai alat analisis.

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang Januari hingga Mei 2020, bertempat di Jakarta. Dengan berfokus pada cuitan selama 30 hari sebelum dan sesudah pentikan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia 2019-2024, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal tidak menjangkau cuitan yang jauh lebih banyak sejak 2011 hingga saat ini.

HASIL PENELITIAN

Analisis Komunikasi Dialogis

Akun @jokowi telah bergabung sejak September 2011. Selama 61 hari, yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, @jokowi menyampaikan sebanyak 104 cuitan. Jika dirata-rata, itu artinya bahwa ada sekitar 1,7 cuitan yang disampaikan @jokowi per hari kepada khalayak, terutama para pengikut akun tersebut. Dengan jumlah pengikut pada akhir 2019 lebih daripada dua belas juta akun, jumlah orang yang terpapar oleh cuitan @jokowi sangat mungkin melampauinya. Kemungkinan-kemungkinan tersebut secara internal dapat berasal dari instrumentalisasi beberapa fasilitas yang disediakan oleh Twitter sendiri. Terutama untuk cuitan tentang hal-hal yang menarik perhatian publik, umumnya terdapat ribuan akun yang kemudian meretweet (membagikan atau memposting kembali) dan/atau menyukainya dan/atau membalasnya. Ketiga jenis tindakan tersebut dapat menggemakan pesan dan mungkin pula menggandakan paparan-

nya. Efek ini dapat semakin berlipat apabila para pengguna twitter memanfaatkan gamitan (*mention*) dan tanda pagar (*hashtag*) sehingga isu tersebut dapat menjadi suatu topik hangat (*trending topic*), sedikitnya di jagad twitter pada rentang waktu tertentu.

Konten cuitan yang disampaikan @jokowi sendiri cukup beragam, mulai dari cuitan tentang hubungan internasional hingga cuitan yang bersifat lebih personal. Dalam suatu klasifikasi sederhana, 104 cuitan tersebut dalam dikelompokkan sebagai berikut.

Tabel Pengelompokan Cuitan @jokowi

No	Kategori Cuitan	Jumlah
1	Hubungan antar-lembaga.	6
2	Hubungan internasional.	16
3	Kehidupan pribadi.	4
4	Legislasi.	3
5	Masalah sosial.	12
6	Pelantikan presiden.	2
7	Pembangunan infrastruktur.	29
8	Peringatan Hari Besar.	13
9	Politik praktis.	3
10	Program kerja.	4
11	Sidang kabinet.	9
12	Lain-lain	3
Total		104

Lebih lanjut, cuitan @jokowi akan dianalisis dengan bantuan konsepsi Lane dan Kent tentang komunikasi dialogis, dengan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Kepentingan Bersama

Salah satu makna penting politik adalah interaksi di antara warga negara yang bebas dan setara untuk menyelenggarakan urusan bersama demi kemanfaatan bersama. Dalam pemaknaan tersebut, terdapat tiga hal pokok. Pertama, interaksi warga yang bebas dan setara. Kedua, penyelenggaraan urusan bersama. Ketiga, perwujudan kemanfaatan bersama. Dengan demikian, politik demokratis bukan hanya dapat dibedakan dari urusan privat, tetapi

juga dapat dipisahkan dari dominasi dan bentuk-bentuk lain penindasan.

Orang berbicara tentang kepentingan bersama tidak semata selama masa kampanye Pemilihan Umum. Selama politik beroperasi, selama itu pula semestinya kepentingan bersama menjadi objek komunikasi politik. Dalam suatu komunikasi politik, kepentingan bersama dibahas; orang mengutarakan kepentingan mereka, mendiskusikannya, dan mendesakkan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Di dalamnya perbedaan-perbedaan dibincangkan lewat suatu proses komunikasi agar tercapai kesepahaman.

Jika diperhatikan, secara kuantitatif hanya 4 dari 104 cuitan @jokowi yang membicarakan kehidupan personalnya. Pertama, saat jalan santai di Istana Bogor bersama cucu pertamanya. Kedua, saat menjelaskan asal-usul panggilan Jokowi. Ketiga, saat menerima cendera mata foto dirinya dari seorang fotografer. Keempat, saat kelahiran cucu ketiganya. Keempat peristiwa tidak memiliki keterkaitan dengan tugas kepresidenan, tetapi memiliki aspek humanis yang kuat. Dua cuitan berkenaan dengan personalitas Joko Widodo, dua lainnya lebih menunjukkan kesan intensitas hubungan dalam keluarga.

Dengan muatan lebih banyak tentang urusan publik dibandingkan hal-hal yang lebih personal, Joko Widodo terkesan ingin menggunakan akun @jokowi lebih untuk suatu komunikasi politik dengan publik. Secara substantif hal ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa kepentingan bersama selalu menjadi pertimbangan dalam kebijakan Presiden Joko

Widodo. Namun, terang bahwa saat menyentuh sisi-sisi personalnya, Jokowi tampak ingin memberikan suatu sokongan humanis ketika *public relations* dalam politik dipahami nyaris selalu dalam kerangka *public affairs*. Terlepas respons positif dan negatif yang menyertainya, pada tataran tertentu, ini terlihat berhasil menyentuh khalayak; terutama jika jumlah retweet dan suka menjadi acuan dalam komunikasi melalui media sosial.

Dalam FGD 28 Mei 2020, Ignatius Haryanto dan Robertus Wardy melihat kecenderungan ini mengandung jebakan formalisme komunikasi. Perhatian yang jauh lebih besar terhadap urusan publik semestinya tidak harus membuat gaya komunikasi melalui Twitter menjadi kaku. Mereka mengamati bahwa pada periode kepemimpinan terdahulu, melalui @jokowi, Presiden Jokowi cukup sering menampilkan sisi kesehariannya, yang turut memberi sentuhan humanis dan dinamis pada komunikasi digital. Kehadiran admin yang turut mengelola akun tersebut, demikian pencermatan mereka, sepatutnya juga tidak lantas membuat cuitan tentang persoalan publik kehilangan kelenturan dan keakraban dengan publik.



Gambar cuitan tentang nama panggilan Jokowi

Hampir seluruh isi cuitan @jokowi adalah tentang persoalan-persoalan publik yang dikelola dalam kapasitas Jokowi sebagai seorang presiden. Dari sisi ruang lingkup, rentang persoalan bersama yang menjadi perhatian dalam komunikasi digital @jokowi memang beragam; mulai dari persoalan legislasi sampai implementasi program kerja kepresidenan. Subjek-subjek pesan memberi signal strategis bahwa presiden bekerja untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bersama tersebut. Seberapa efektif penyelesaian persoalan-persoalan dimaksud tetap menjadi suatu pertanyaan relevan. Namun, perlu studi lain untuk mendalami secara lebih spesifik kajian tersebut. Dalam hal ini, cukup dikatakan bahwa pilihan gaya komunikasi digital @jokowi membawa konsekuensi tertentu.

Sebagian besar cuitan @jokowi ditulis dengan gaya deskriptif dan naratif. Gaya ini menguntungkan dalam pengertian bahwa keduanya memberi sentuhan personal dan memberikan penjelasan peristiwa, sedikitnya dari sisi penulisnya. Selain meminimasi kontroversi, gaya ini juga dapat menghindarkan penulisnya dari konfrontasi berlebihan. Namun, cara bermain cenderung aman tersebut bukan tanpa risiko. Jokowi cenderung gagal menjelaskan argumen di balik langkah-langkah politiknya, dan hal ini mempersempit ruang dialog sekaligus pemahaman terutama kalangan *attentive public*, yang biasanya menuntut suatu argumen logis. Tinjauan ini juga dapat menjadi salah satu penjelasan mengapa Jokowi juga sulit mendapatkan dukungan di luar kalangan loyalisnya.

2. Dorongan Partisipasi

Demokrasi deliberatif, dengan konsep permusyawaratan rakyat sebagai spirit utamanya, menggantungkan keberlangsungannya pada partisipasi publik. Tiada demokrasi tanpa partisipasi, dan tiada partisipasi tanpa kesadaran politik. Aspek terakhir inilah yang kemudian menentukan kualitas demokrasi, termasuk dibandingkan partisipasi yang tidak otentik sebagai hasil mobilisasi atau pun hasil intimidasi. Partisipasi berkesadaran merupakan hasil komunikasi politik berbasiskan dialog konstruktif sekaligus voluntaristik tentang persoalan bersama. Ini berarti bahwa untuk menghasilkan partisipasi berkualitas, warga negara perlu memiliki informasi dan pengetahuan politik memadai.

Dalam kerangka deliberasi, relasi di antara warga tidak cukup hanya setara, tetapi juga terbuka. Dengan itu bukan berarti bahwa elite tidak boleh mendayagunakan tindakan-tindakan strategis, tetapi bahwa komunikasi perlu menghasilkan manfaat mutual agar terhindar dari manipulasi politik. Keterlibatan digital menuntut suatu dorongan partisipasi, tidak dalam maknanya sebagai mobilisasi manipulatif, tetapi sebagai suatu insentif bagi demokrasi partisipatori. Bahkan seandainya dorongan semacam itu minim, sedikitnya tindakan komunikasi tidak dimaksudkan untuk menghalangi partisipasi.

Di sinilah cuitan-cuitan @jokowi, pada tataran tertentu, menemukan keterbatasannya. Sedikitnya terdapat dua belas cuitan terkait berbagai masalah sosial, mulai kebakaran hutan sampai kekerasan dan terorisme. Meskipun demikian,

sekali lagi dengan gaya naratif dan deskriptif, cuitan @jokowi lebih mengesankan pemberitahuan tentang apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tertentu. Hal yang sama juga dapat kita temukan dalam cuitan tentang pembangunan infrastruktur. Alih-alih memberikan dorongan partisipasi bagi warga, yang lebih tampak adalah peran dominan pemerintah. Padahal, dalam kasus penyerangan Menkopolhukam Wiranto, misalnya, ajakan untuk memerangi radikalisme dan terorisme bukan tidak bersambut.



Gambar cuitan tentang ajakan bersama memerangi terorisme

Seperti diketahui bahwa pada 10 Oktober 2019, Menkopolhukam Wiranto diserang oleh pasangan radikal. Saat itu, muncul kontroversi tentang berbagai fakta seputarnya, termasuk motif penyerangannya, termasuk motif penyerangan. Namun, di luar itu, dukungan terhadap upaya pemberantasan radikalisme dan terorisme muncul sebagai bagian respons publik, termasuk dalam balasan cuitan @jokowi. Ajakan dan dorongan serupa ini, sayangnya, tidak banyak dilakukan pada kasus-kasus lain, sehingga keberjarakan komunikasi dan keterbatasan partisipasi tidak mampu ditutup secara memadai lewat pemanfaatan Twitter.

Terdapat 29 cuitan terkait pembangunan infrastruktur, termasuk yang memotret kunjungan Jokowi ke berbagai wilayah untuk meresmikan jalan, bangunan, dan yang lainnya. Mengherankan bahwa meskipun dalam beberapa kesempatan cuitan @jokowi menggambarkan kedekatan relasi dengan warga setempat, tidak satu pun di antara cuitan tersebut yang mendorong keterlibatan partisipasi warga dalam pembangunan. Tidak sekadar tuntutan perundang-undangan, pelibatan warga dalam pembangunan adalah pula suatu norma penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ini kiranya memperluas kesempatan agar warga berperan sebagai subjek, bukan sekadar objek, pembangunan.

Jika dibandingkan, gaya blusukan telah menjadi penanda ikonik kehadiran Jokowi dalam politik, bahkan sejak saat dia menjabat sebagai Walikota Surakarta pada 2005-2012. Blusukan dipandang positif sebagian kalangan, karena ia menjadi mekanisme pengenalan langsung masalah dari tangan pertama dan menumbuhkan interaktifitas. Namun, tidak sebagaimana yang kerap didapati publik dalam blusukan, komunikasi Jokowi melalui Twitter tidak memberi dorongan partisipasi, kecuali pada tataran yang sangat minim.

Adinda T Muchtar, dalam FGD 28 Mei 2020, memberi catatan bahwa cuitan @jokowi memang jauh lebih bersifat normatif. Berbeda dibandingkan saat berdialog langsung dengan kalangan petani atau nelayan, misalnya. Dalam dialog-dialog semacam itu, Presiden Jokowi biasanya bukan hanya menampung masalah-

masalah, tetapi lebih jauh datang dengan tindak lanjut tertentu termasuk memberi kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam penyelesaian masalah. Komunikasi melalui Twitter, lanjut Adinda, sesungguhnya juga memungkinkan untuk bergerak lebih jauh ke arah serupa.

3. Menghargai Pandangan Orang Lain
Penghargaan terhadap perbedaan juga merupakan bagian nilai pokok demokrasi. Pertama, bahwa kemerdekaan orang untuk menyampaikan pandangan memperoleh perlindungan konstitusional. Kedua, perbedaan tersebut memungkinkan adanya kontrol dan dapat menghindarkan dari dominasi pihak tertentu. Lebih lanjut, penghargaan terhadap perbedaan pandangan itu juga menjauhkan politik dari kemungkinan konflik; sebab, sejauh perbedaan masih dapat diperbincangkan, sejauh itu pula orang melihat dialog sebagai suatu mekanisme menuju pengambilan keputusan tanpa harus berbenturan.

Aspek penghargaan terhadap perbedaan pandangan ini memiliki kaitan erat pula dengan partisipasi politik. Dorongan untuk berpartisipasi dapat kehilangan makna jika di sana tidak ada perlindungan dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan. Mereka yang berpartisipasi dalam suatu dialog publik juga perlu memiliki kedewasaan untuk toleran terhadap keberagaman pandangan. Aspek ini yang terasa absen dalam Pemilu 2019, pada tataran *elite* maupun massa, sehingga perbedaan pilihan politik dapat memicu secara mudah perseteruan.

Kendati demikian, patut diakui bahwa Presiden Jokowi nyaris tidak

pernah menunjukkan secara terbuka ekspresi permusuhan. Selama masa kampanye Pilpres, Jokowi beberapa kali menunjukkan keprihatinannya pada gejala permusuhan politik. Kelenturan ini berkontribusi terhadap pembentukan suatu ‘kabinet akomodasionistik’ yang turut menampung lawan politik pasca-Pemilu 2019. Namun, tidak terlalu tegasnya separasi antara kawan dan lawan ini pula yang sempat menimbulkan tegangan internal koalisi menjelang pembentukan Kabinet Indonesia Maju.



Gambar cuitan tentang komitmen persatuan di kalangan elite

Dalam cuitannya, @jokowi sesungguhnya tidak pernah berpandangan ofensif. Kendati begitu, kerasnya pertarungan politik selama Pemilu 2014 dan 2019 telah menciptakan polarisasi sosial yang tajam. Dampaknya, bahkan setelah pembentukan kabinet akomodasionistik pun kolom balasan pada berbagai cuitan @jokowi masih diwarnai kata-kata yang kurang bersahabat. Nyaris tidak pernah membalas kembali cuitan para pengikutnya, @jokowi pun terhindar dari debat tidak produktif dan kontroversi berkepanjangan. Sayangnya, hal serupa juga mengurangi tingkat interaktifitas komunikasi Jokowi melalui Twitter.

Forum FGD yang diikuti ketiga nara sumber ahli juga menunjukkan pandangan serupa. Sejauh pengetahuan mereka, gagasan pokok Presiden Jokowi secara sederhana terangkum melalui slogan “kerja, kerja, kerja”. Di antara konsekuensi gagasan tersebut adalah bahwa Jokowi kemudian enggan untuk berkonfrontasi. Bahkan ketika berhadapan dengan mereka yang berbeda pandangan pun, tidak terlihat serangan balik yang merendahkan. Cuitan @jokowi memang kurang interaktif, tetapi gaya komunikasi Presiden Jokowi memang mengesankan ramah terhadap keberagaman pandangan. Dalam konteks hubungan internasional, hal ini memberi keuntungan karena Indonesia tidak perlu berkonfrontasi dengan negara lain, kendati terdapat perbedaan kepentingan.

Ramah terhadap pandangan orang lain tidak selalu berarti akomodasionistik terhadap pandangan mereka. Padahal, tuntutan demokrasi tidak sekadar menghargai perbedaan pandangan, tetapi juga responsif dan akomodasionistik terhadap kepentingan publik. Dalam kasus revisi UU KPK sekitar September 2019, misalnya, terang terlihat ambiguitas antara cuitan @jokowi dibandingkan tindakan politiknya. Mencuit telah menerima banyak masukan untuk menerbitkan Perpu demi menganulir UU No 19 Tahun 2019 tersebut, faktanya, Presiden Jokowi menunjukkan sikap inkonsisten terkait pelemahan KPK; mulai dari membiarkan UU tersebut berlaku sampai mengajukan nama-nama yang kontroversial sebagai calon pemimpin KPK untuk diseleksi DPR.

4. Komitmen

Komitmen di sini dapat dimengerti dalam dua segi yang saling terkait. Pertama adalah komitmen komunikatif, dalam arti kesungguhan dalam keterlibatan dialogis untuk menemukan kesepahaman. Kedua adalah komitmen politis, dalam arti kesungguhan untuk mewujudkan kebijakan berorientasi kebaikan bersama. Kedua bentuk komitmen berkelindan dan saling mendukung sehingga tindakan di sini tidak sekadar demi perluasan kuasa, melainkan pula berdampak pada kepentingan yang lebih luas. Di dalamnya, diskusi publik tetap menjadi kunci yang memberikan dorongan keterlibatan dan pertukaran gagasan.

Pemahaman dasar politik menunjukkan bahwa negosiasi menjadi bagian strategis tindakan-tindakan politik, persis karena politik itu mendialogkan perbedaan kepentingan. Hal ini bukan saja menghindarkan politik dari konflik yang mengeras, tetapi juga memberi insentif bagi partisipasi politik, termasuk lewat artikulasi kepentingan. Komitmen pada dialog, bukan pemaksaan atau intimidasi, menjadi bagian penanda penting yang membedakan demokrasi dari otokrasi.

Telah disampaikan bahwa Presiden Jokowi memiliki kelenturan komunikasi, yang membantunya untuk dapat membangun relasi dengan kawan maupun lawan. Kelenturan ini memberi tingkat kepastian lebih baik bagi bertahannya kekuasaan Jokowi. Namun, ia berubah menjadi suatu kelemahan, jika kita menilik lebih dalam mengenai komitmen keterlibatan komunikasi dan politiknya lewat akun @jokowi. Dalam konteks keterlibatan komunikasi, intensitas

dialog berpeluang untuk menjadi jalan persuasi agar dukungan terhadap suatu posisi politik menguat. Faktanya, dengan mengutamakan narasi dan deskripsi lebih dibandingkan argumentasi, @jokowi sulit untuk dapat meyakinkan dan mengubah posisi mereka yang berlawanan pandangan.

Dari sisi komitmen politik, ambiguitas dan inkonsistensi tampak membayangi retorika yang dikembangkan Presiden Jokowi. Dalam kasus revisi UU KPK, kita telah melihat kecenderungan inkonsistensi tersebut. Namun, dalam kasus berbeda, misalnya amendemen UUD 1945, ambiguitas telah menciptakan kabut politik yang menghalangi kejelasan sikap sang presiden. Pada satu sisi, cuitan @jokowi meminta warga agar memberi kesempatan kepada MPR untuk melakukan kajian mendalam rencana amendemen konstitusi. Namun, dalam kesempatan berbeda, Presiden Jokowi menegaskan penolakannya terhadap rencana tersebut sembari menduga bahwa ada yang ingin menjerumuskannya dengan memasukkan rencana perubahan yang memungkinkan seorang presiden untuk menjabat tiga periode.

Joko Widodo @jokowi · 16 Okt 19
Saat bertemu pimpinan MPR periode 2019-2024 pagi ini, kami sempat menyinggung soal amendemen UUD 1945. Yang penting adalah melakukan kajian mendalam, menampung usulan semua tokoh, akademisi, dan masyarakat sebelum dirumuskan.

Jadi, berikan kesempatan kepada MPR untuk bekerja



Gambar cuitan tentang pertemuan membahas rencana amendemen UUD 1945

Ambiguitas pesan ini dikritik oleh Adinda T Muchtar, yang dalam FGD menyebutnya sebagai sumber *indecisiveness*. Ketika pelantikan, @jokowi mencuit “Layarku sudah terkembang, kemudiku sudah terpasang. Kita bersama menuju Indonesia Maju.” Cuitan ini menegaskan suatu keyakinan dan komitmen, yang sayangnya tidak selalu tampak dalam tindakan. Misalnya, Presiden Jokowi dikenal menghargai keberagaman, tetapi manakala serangan terhadap keberagaman itu menjadi suatu isu sensitif berdampak komodifikasi politik, Jokowi cenderung menghindari kontroversi sehingga mengesankan suatu pembiaran.

Dari berbagai cuitan dapat dilihat bahwa @jokowi tampak memiliki komitmen untuk membahas berbagai hal melalui suatu dialog. Bahkan dalam bentang perbedaan pandangan politik yang menjauhkan kawan dari lawan, Presiden Jokowi cenderung percaya bahwa dialog dapat mengubah posisi seseorang. Namun, kelenturan tersebut mengesankan ambiguitas dan inkonsistensi, yang sama sekali bukan hal aneh dalam konstelasi politik nasional yang begitu cair dan nyaris tanpa perbedaan identitas ideologis. Posisi tengah, yang kerap terombang-ambing antara pro dan kontra memang memberi ruang aman bagi keberlangsungan kekuasaan sekaligus mengesankan suatu ambiguitas pesan.

5. Pelingkupan

Bahkan ketika ruang partisipasi telah dibuka, tidak serta-merta bahwa setiap orang memiliki kemampuan sama untuk dapat berperan serta. Karena itu menjadi penting untuk memastikan agar semua orang berkesempatan untuk turut serta

dalam proses politik, kendati pada akhirnya, dibutuhkan prasyarat yang jauh lebih kompleks untuk menghasilkan suatu bentuk partisipasi yang berkualitas. Tidak mengherankan, konstitusi negara-negara demokratis menjamin aspek pelingkupan demi memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atas hak-hak dasar warga negara.

Dalam suatu proses diskursus, aspek pelingkupan ini juga berperan penting untuk bukan hanya memastikan keterjangkauan. Bahwa semua orang, seandainya tidak dapat dijangkau secara keseluruhan, setidaknya tidak dihalangi keturutsertaannya. Keturutsertaan ini adalah suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan secara sukarela; orang boleh turut serta, tetapi seandainya mereka tidak turut serta, ketidakaktifan itu adalah suatu putusan mandiri. Diskursus berangkat antara lain dari suatu kehendak baik bahwa tidak ada subjek yang dikecualikan, dan semua berhak untuk didengar pandangan-pandangannya.

Media sosial seperti Twitter adalah suatu aplikasi terbuka yang dapat digunakan oleh siapa pun yang berusia minimum 13 tahun. Perlindungan privasi dan keamanan suatu akun dapat diatur secara otonom oleh seorang pemilik akun, termasuk untuk menjadikan suatu cuitan dapat diakses secara terbuka oleh publik. Suatu akun dapat mengikuti akun lain tidak harus dalam suatu relasi timbal balik. Selain itu, terdapat fasilitas blok yang membantu pengguna dalam membatasi akun tertentu untuk mengikuti mereka. Dengan tatanan dasar seperti itu, Twitland pada dasarnya adalah suatu kawasan

inklusif dengan batasan tertentu yang dapat diterima secara praktis.

Dalam konteks relasi antar-akun, @jokowi diikuti lebih 12 juta akun lain dan seluruh cuitannya dapat diakses secara terbuka oleh siapa pun. Tidak pernah memanfaatkan fasilitas blokir, @jokowi sejak awal dirancang untuk menjangkau sebanyak mungkin khalayak tanpa eksklusivitas terhadap siapa pun. Dalam panasnya persaingan selama Pemilu 2019 pun @jokowi tidak mengeksklusivitas akun tertentu yang memiliki pandangan berseberangan. Akun @jokowi juga dapat *dimention* oleh akun lain, termasuk ketika mereka menyampaikan pandangan yang berlawanan dengan pandangan Presiden Jokowi.

Berbasis hasil FGD, Ignatius Haryanto menyatakan bahwa pelingkupan merupakan salah satu kekuatan @jokowi. Cuitan menegani pembangunan Papua, atau tentang keterlibatan Indonesia dalam forum internasional, menunjukkan suatu inklusi dan juga empati. Bahkan ketika berhadapan demonstrasi menentang hasil Pemilu, @jokowi mencait agar pihak kepolisian mengutamakan persuasi. Jika merujuk cuitan-cuitan yang ada, Jokowi tidak tampak ingin mengeksklusivitas mereka yang berlainan pandangan.

Namun demikian, terkait partisipasi dan pelingkupan, terdapat perbedaan mendasar antara boleh bersuara dibandingkan didengar, juga antara didengar dan dipertimbangkan. Tentu saja kita memahami bahwa tidak mungkin ada suatu putusan yang memuaskan semua pihak, tetapi jelas bahwa keterlingkupan saja tidak lantas memastikan bahwa suara

orang-orang menjadi pertimbangan pengambilan putusan. @jokowi tidak mengeksklusivitas siapa pun untuk mengakses dan merespons cuitannya; tetapi, bahkan manakala warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka, putusan yang diambil lantas selaras dengan masukan publik tersebut.



Gambar cuitan Presiden Jokowi menerima masukan terkait revisi UU KPK

Mari, sekali lagi, menimbang revisi UU KPK yang kontroversial itu. Pada 26 September 2019, Presiden Jokowi bertemu sejumlah tokoh masyarakat di Istana Merdeka. Saat itu, mereka menggemakan tuntutan banyak kalangan agar presiden mengeluarkan Perpu untuk menggantikan muatan pasal yang mengarah pelemahan KPK. Sebelumnya, presiden telah menyatakan menolak untuk mengeluarkan Perpu; tetapi, setelah pertemuan tersebut, presiden menyampaikan bahwa dirinya akan menimbang kembali masukan sebelum memutuskan. Faktanya, pada 17 Oktober 2019 UU KPK otomatis berlaku terhitung 30 hari setelah disahkan DPR, kendati tanpa tanda tangan presiden. Jadi, sebenarnya, pentinglah untuk menjangkau rentang gagasan berlainan, tetapi penting pula untuk meneguhkan komitmen pada kebaikan publik.

6. Kesiediaan Untuk Mendengar Respons

Komunikasi interaktif ditandai oleh adanya respons, yang kemudian memungkinkan terjadinya relasi timbal balik di antara dua atau lebih pihak yang terlibat. Lewat respons terjadi pembalikan posisi komunikator dan komunikan, yang menuntut kehendak untuk berbagi kesempatan dan kesiediaan untuk mendengarkan. Ini berarti bahwa komunikasi interaktif membutuhkan empati, yang tanpanya tidak akan terbangun suatu relasi timbal balik dan memberi manfaat mutual bagi mereka yang terlibat.

Aspek mutualitas atau kesalingan cukup memberi nuansa pembeda antara model komunikasi interaktif dibandingkan model-model yang cenderung manipulatif, seperti propaganda, bahkan manakala di sana tidak ada intimidasi. Respons memberi signal kepada komunikator awal tentang pandangan dan kepentingan lawan komunikasinya. Respons juga menunjukkan derajat kepedulian lawan komunikasi terhadap apa yang disampaikan sebelumnya, meskipun respons bisa muncul dalam nada yang negatif. Di sinilah kesiediaan untuk mendengarkan respons menunjukkan kehendak baik komunikator, yang kemudian turut menentukan derajat interaktifitas suatu proses komunikasi.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa dengan pilihan gaya narasi dan deskripsi, tampak bahwa akun @jokowi memang tidak dimaksudkan untuk membangun suatu interaksi kuat dengan audiens. Beberapa kali akun @jokowi menyebut bahwa dirinya mendengarkan, menimbang, dan bersimpati terhadap beragam

pandangan, termasuk yang berbeda. Namun, sebagian tindakan dan putusannya tampak berjarak dari suara publik. Kontroversi seputar revisi UU KPK dan beberapa rancangan undang-undang lain memperoleh respons meluas dengan nada penolakan cukup kuat di berbagai wilayah Indonesia.

Salah satu respons muncul lewat demonstrasi mahasiswa di Kendari pada 26 September 2019, yang berakhir tragis dengan ditembaknya dua orang mahasiswa. Penyelesaian hukum atas masalah tersebut juga memperoleh kritik banyak pihak. Dalam cuitan 26 September 2019, @jokowi memerintahkan penanganan persuasif oleh aparat Kepolisian beserta seruan agar demonstrasi dilaksanakan secara tertib. Pada 27 September 2019, @jokowi menyampaikan belasungkawa dan memerintahkan penegakan hukum. Namun, seruan-seruan melalui akun Twitter tampak berjarak dari kenyataan bahwa UU KPK hasil revisi tetap diberlakukan dan penanganan demonstrasi secara keras di berbagai kota tetap dijalankan.



Gambar cuitan tentang respons Jokowi terhadap korban demonstran meninggal

Respons @jokowi dalam cuitan hampir sama tidak memadainya dengan respons Presiden Jokowi terhadap persoalan yang memuncak

selama September hingga Oktober, yaitu revisi UU KPK, RUU KUHP, dan *omnibus law* rancangan undang-undang Cipta Kerja. Pada 20 September 2019, @jokowi mencuit bahwa pemerintah menunda pengesahan RUU KUHP, tetapi tanpa penjelasan tentang apa langkah selanjutnya. Pada 26 September 2019, cuitan @jokowi menegaskan bahwa dirinya mendengar aspirasi para demonstran, tetapi Presiden Jokowi membiarkan UU KPK berlaku pada 17 Oktober 2019. Pada 25 Oktober 2019, @jokowi juga mencuit tentang *omnibus law* yang disebutkan mendorong penciptaan lapangan kerja, tetapi kontroversi seputarnya membuat rancangan tersebut belum kunjung disahkan.

Dengan demikian, memerhatikan cuitan @jokowi, terdapat inkongruensi antara tindakan mendengarkan, merenungkan, dan merespons yang menjadi tuntutan bagi suatu komunikasi dialogis. Ajakan untuk berdialog, pernyataan tentang mendengarkan untuk menimbang, ternyata tidak serta-merta bermakna respons positif untuk mengakomodasi pandangan berbeda dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Pertimbangan kepentingan bertahannya kekuasaan dari tekanan *elite* tampak jauh lebih kuat dibandingkan merespons kepentingan khalayak lebih luas.

7. Penyediaan Sumber Daya Untuk Dialog

Proses dialog melalui Twitter sesungguhnya tidak membutuhkan suatu sumber daya khusus. Sebab, sebagaimana telah disebutkan, aplikasi ini memang menyediakan fasilitas yang memungkinkan suatu percakapan dengan cakupan jaringan

komunikasi yang luas. Seseorang hanya perlu mengunduh aplikasinya, membuat suatu akun, dan kemudian siap untuk terlibat dalam suatu komunikasi berjejaring; dia dapat mencuitkan pandangannya, membalas cuitan suatu akun, meretweet cuitan akun lain, atau bisa juga menyukainya. Di luar itu, tentu saja harus tersedia perangkat keras seperti komputer atau alat komunikasi lain seperti gawai, dan harus pula tersedia jaringan internet.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) menyebut penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 64,8% pada 2018. Angka ini naik 10,12% dari tahun sebelumnya, atau mencapai 27 juta pengguna. Ini berarti bahwa terdapat 171,17 juta jiwa pengguna internet dari total 246,16 juta jiwa penduduk Indonesia pada 2018. Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan akses di antara wilayah berlainan. Hasil riset tersebut mencatat, kontribusi pengguna internet per wilayah paling banyak terdapat di pulau Jawa yakni mencapai 55 %, kemudian disusul oleh Sumatera (21%), Sulawesi-Maluku-Papua (10%), Kalimantan (9%), serta Bali dan Nusa Tenggara (5%).

(<https://katadata.co.id/berita/2019/05/16/survei-apjii-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-capai-648>).

Potret tersebut masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membuka akses yang luas dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketersediaan akses semacam itu penting dalam kerangka komunikasi, pendidikan, perekonomian, dan banyak bidang lainnya. Dalam konteks keterlibatan digital, ini membantu bagi pemerintah untuk

menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Indonesia; sebaliknya, bagi warga, ini dapat mempermudah akses mereka pada layanan publik dan keterlibatan mereka dalam diskursus publik.

8. Pembahasan

Konsep keterlibatan berfokus pada penciptaan dan penciptaan ulang makna melalui komunikasi sebagai suatu tindakan bersama. Pada tataran sosial, proses keterlibatan komunikasi mewujudkan dalam upaya terstruktur untuk mendorong agar diskursus dapat diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Di dalamnya, opini dan perspektif berlainan terepresentasi melalui suatu diskursus. Sebagai suatu strategi, keterlibatan sosial bahkan lebih jauh memberi ruang partisipasi agar warga dapat memberi sumbangan pada pembangunan. Ini adalah suatu peran serta kolektif yang diorientasikan pada suatu tujuan kelompok.

Dari sisi medium, Twitter sebenarnya memiliki potensi untuk dijadikan sebagai sarana diskursus. Pertama, Twitter memungkinkan suatu percakapan dengan melibatkan banyak orang. Kedua, Twitter memungkinkan jangkauan komunikasi yang jauh lebih luas dalam suatu jaringan. Ketiga, di luar fasilitas balas, retweet, dan suka, Twitter juga memperlengkapi diri dengan cek fakta, yang dapat meminimasi penyebaran dan kabar bohong. Meskipun demikian, pada akhirnya Twitter tidak lebih daripada suatu aplikasi yang merupakan instrumen komunikasi. Isi pesan dan interaktifitas, dengan begitu, lebih ditentukan oleh pemilik akun berikut relasinya dengan akun lain dalam jaringan komunikasi yang sama.

Memerhatikan cuitan @jokowi dalam 30 hari sebelum dan sesudah pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia 2019-2024, penelitian ini mendapati suatu derajat interaktifitas yang rendah. Beberapa hal dapat ditunjuk sebagai penyebabnya. Pertama, gaya cuitan @jokowi cenderung naratif dan atau deskriptif sehingga kurang mampu memberi dorongan partisipasi. Kedua, balasan yang diberikan khalayak sebagian besar berisi dukungan dan cemooh terdampak polarisasi selama masa Pemilu. Ketiga, @jokowi juga tidak pernah memberikan balasan balik terhadap respons akun lain. Keempat, sikap politik yang disampaikan @jokowi cenderung normatif atau pun ambigu, sekaligus menghindari kontroversi.

Apa yang dibayangkan oleh Lane dan Kent (dalam Johnston dan Taylor, eds, 2018) tentang komunikasi dialogis tidak terjadi di sini. Kurang terdapat kehendak yang memadai untuk bertukar informasi dan pandangan; masing-masing akun menyampaikan pandangannya, tetapi tidak dalam kerangka suatu dialog. Keterlingkupan dan tiadanya hambatan serius komunikasi pun menjadi tidak terlalu bermakna karena hal tersebut tidak dimanfaatkan untuk menghadirkan partisipasi untuk mengajukan pandangan dan pilihan kebijakan. Konsekuensi yang paling serius dari itu semua adalah bahwa komunikasi digital di sini tidak mampu mendorong suatu perubahan sosial.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Akun @jokowi telah bergabung dengan Twitter sejak September 2011, dengan pengikut pada akhir

- 2019 sekitar 12 juta akun. Selama 61 hari yang menjadi fokus dalam penelitian ini, @jokowi mencuit sebanyak 104 kali. Cuitan terbanyak tentang pembangunan infrastruktur sebanyak 29 cuitan, kemudian cuitan tentang hubungan internasional sebanyak 19 cuitan.
2. Keterlibatan digital akun @jokowi tidak optimal, yang dapat ditinjau dari aspek-aspek berikut. Dorongan partisipasi didapati hanya pada 1 cuitan, penghargaan terhadap keberagaman pandangan cukup moderat, komitmen politik dan komitmen komunikasi menunjukkan ambiguitas dan inkonsistensi, pelingkupan cukup optimal, respons dalam cuitan berjarak dari tindakan, dan penyediaan sumber daya dialog masih bisa dioptimalkan.
 3. Dengan fakta-fakta tersebut, berarti bahwa keterlibatan digital Presiden Jokowi melalui akun @jokowi membutuhkan derajat interaktifitas yang lebih optimal. Hal ini dapat didorong apabila @jokowi mengganti gaya cuitan yang cenderung naratif dan deskriptif menjadi lebih asertif. Ambiguitas dan inkonsistensi dalam komunikasi banyak dipengaruhi oleh cairnya relasi politik, yang menuntut kelenturan agar tidak mudah terbaca lawan.

Saran

1. Beberapa kemungkinan studi lanjutan terkait objek serupa dapat diperdalam untuk memperkaya khazanah penelitian tentang keterlibatan digital. Mungkin dengan membandingkan periode pertama dan periode kedua kekuasaan Presiden Jokowi. Kemungkinan lain adalah dengan berfokus pada diskursus tentang persoalan tertentu, seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia, legislasi, atau isu-isu lain yang potensial membelah opini publik.
2. Secara praktis, keterlibatan digital menjadi suatu kebutuhan bagi tatanan demokrasi kontemporer. Penghargaan keberagaman pandangan dan pelingkupan semata tidaklah memadai untuk mewujudkan suatu komunikasi dialogis. Selain dorongan partisipasi, komitmen dan respons dapat memberi insentif bagi penciptaan suatu diskursus. Bukan hanya perlu mengubah gaya komunikasi agar lebih asertif dan interaktif, @jokowi perlu mengoptimalkan keterlibatan dalam komunikasi digital demi mendorong suatu perubahan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, Andi dan Seniwati. 2016. *The Internet and Social Media in Political Participation in Indonesia*. International Journal of Management and Applied Science Volume-2, Issue-8, Special Issue-1, August 2016 pp 95-97.
- Annur, Cindy Mutia. 2019. Survei APJII: Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Capai 64,8%. <https://katadata.co.id/berita/2019/05/16/survei-apjii-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-capai-648>
- Awaludin, M. (2020). Application Of Analytical Hierarchy Process Method For Employee

- Performance Evaluation At Pt Xyz. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 7(1), 137–150.
- Bruns, Axel dan Hallvard Moe. 2014. *Structural Layers of Communication on Twitter* dalam *Twitter and Society*, eds. Katrin Weller, Axel Bruns, Jean Burgess, Merja Mahrt, dan Cornelius Puschmann. pp 15-28. New York: Peter Lang Publishing.
- Bungin, Burhan. 2011 [cetakan kelima]. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Firmansyah, Mas Agus, Siti Karlinah, dan Suwandi Sumartias. 2017. *Kampanye Pilpres 2014 dalam Konstruksi Akun Twitter Pendukung Capres*. *The Messenger* Vol 9, No 1, January-June 2017, pp 79-90. Semarang: Universitas Semarang.
- Fitton, Laura, Anum Hussain, dan Brittany Leaning. 2014. *Twitter for Dummies*. New Jersey: John Wiley and Sons Inc.
- Johnston, Kim A. 2018. *Toward a Theory of Social Engagement* dalam Kim A Johnston dan Maureen Taylor, *The Handbook of Communication Engagement* pp. 19-32. New Jersey and Massachusetts: Wiley Blackwell.
- Lane, Anne dan Michael L Kent. 2018. *Dialogic Engagement* dalam Kim A Johnston dan Maureen Taylor, *The Handbook of Communication Engagement* pp. 61-72. New Jersey and Massachusetts: Wiley Blackwell.
- Murthy, Dhiraj. 2013. *Twitter: Social Communication in the Twitter Age*. Cambridge: Polity Press.
- Purwanto, Ridwan. 2017. *Understanding the Art of Communication of President Jokowi in the New Media Era*. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies* Vol. 6 No. 1 December 2017, pp. 44-49. *International Journals of Sciences and High Technologies*.
- Rakhmat, Jalaluddin. 2009 [cetakan keempatbelas]. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Schmidt, Jan-Hinrik. 2014. *Twitter and the Rise of Personal Publics* dalam *Twitter and Society*, eds. Katrin Weller, Axel Bruns, Jean Burgess, Merja Mahrt, dan Cornelius Puschmann. pp 3-14. New York: Peter Lang Publishing.
- Taylor, Maureen dan Michael L Kent. 2014. *Dialogic Engagement: Clarifying Foundational Concepts* dalam *Journal of Public Relations Research* 26, pp. 384-398. London: Taylor and Francis.